



Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Keterkaitan Dengan Pendidikan Karakter di Indonesia

Pingkan Regi Genika^{a, 1*}, Dinie Anggraeni Dewi^{a, 2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ pingkanregig@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 5 Maret 2021;

Revised: 18 Maret 2021;

Accepted: 22 Maret 2021;

Kata-kata kunci:

Pendidikan

Kewarganegaraan;

Pendidikan Karakter;

Pendidikan Nilai.

: ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kualitatif deskriptif keterkaitan antara Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Karakter di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan telah memiliki beberapa nama berdasarkan perkembangan politik Indonesia. Istilah pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan telah muncul untuk membentuk konsep sekarang. Pada tahun 1994 diganti namanya menjadi Pancasila dan kewarganegaraan, dan akhirnya berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Konsep tersebut diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan untuk semua tingkat termasuk di universitas. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan pendidikan kewarganegaraan sebagai bidang studi akademis yang masih dibutuhkan perkembangan epistemologis dan sivitas akademika agar posisinya semakin kokoh dan menenangkan. Dalam hal ini, pendidikan kewarganegaraan memiliki pendidikan karakter yang dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya pendidikan dalam pencapaian tujuan kognitif atau pengetahuan saja melainkan memiliki juga kemampuan afektif yang akan membentuk karakter atau sikap yang belum sepenuhnya ada. Tujuan agar tercapainya pendidikan yang berkarakter serta warga negara Indonesia dalam pendidikan kewarganegaraan perlu keikutsertaan warga negara untuk mewujudkannya.

Keywords:

Citizenship Education;

Character Education;

Value Education.

ABSTRACT

Citizenship Education In Relation to Character Education in Indonesia. *This study aims to qualitatively examine the descriptive relationship between Citizenship Education and Character Education in Indonesia. Citizenship education has had several names based on the development of Indonesian politics. The terms citizenship and citizenship education have emerged to shape the concept now. In 1994 it was renamed Pancasila and citizenship, and finally under Law No. 20 of 2003. The concept was changed to citizenship education for all levels including at the university. Citizenship education in Indonesia is still faced with the challenges of citizenship education as an academic field of study that still needs epistemological development and academic community in order to strengthen its position and calm down. In this case, citizenship education has a character education that in the learning of Citizenship Education is not only education in the achievement of cognitive goals or knowledge but also has affective abilities that will form a character or attitude that does not yet fully exist. The goal of achieving character education needs citizen participation.*

Copyright © 2021 (Pingkan Regi Genika & Dinie Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite : Genika, P. R., & Dewi, D. A. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Keterkaitan Dengan Pendidikan Karakter di Indonesia. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 1(2), 33–40. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/220>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pendidikan kewarganegaraan telah memiliki beberapa nama berdasarkan perkembangan politik Indonesia. Istilah pendidikan kewarganegaraan dan kewarganegaraan telah muncul untuk membentuk konsep sekarang yang bernama "kewarganegaraan" yang diciptakan pada tahun 1957. Pembahasan bagaimana mendapatkan dan kehilangan identitas nasional atau *civics* (diciptakan pada tahun 1962) membahas lebih lanjut tentang sejarah kebangkitan nasional dalam konteks UUD 1945. Pidato politik kenegaraan terutama diarahkan pada pembangunan bangsa dan karakter Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan (diciptakan tahun 1968). Namun, pada tahun 1975 kewarganegaraan pendidikan berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila mulai dari Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas, dan Pendidikan Pancasila dan pendidikan kebangsaan bagi mahasiswa. Pada tahun 1994 diganti namanya menjadi Pancasila dan kewarganegaraan. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 konsep tersebut diubah menjadi pendidikan kewarganegaraan untuk semua tingkat termasuk di universitas.

Tujuan dalam mata kuliah agar mahasiswa memiliki kompetensi tertentu yang telah ditetapkan. Kompetensi yang diharapkan dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan adalah mahasiswa menjadi profesional yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis, berkeadaban, memiliki daya saing, berdisiplin, berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan Pancasila. Sedangkan, hakikatnya pendidikan kewarganegaraan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara mulai dari pendidikan sekolah yang didapat, di rumah termasuk keluarga serta masyarakat demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.

Untuk memantapkan Pendidikan Kewarganegaraan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang PKn pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dan lembaga pendidikan tinggi. Kebijakan PKn telah diterapkan di lembaga formal, seperti sekolah dan institusi pendidikan tinggi, tetapi krisis moral tidak henti-hentinya melanda Indonesia. Secara sistematis, landasan yuridis formal. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Sistem sebagai landasan operasional, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi dan no. 23 dari 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan sebagai landasan kurikuler (Sabarudin, 2010, h. 66), dan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

Pendidikan karakter harus membawa siswa- siswa ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya mengamalkan nilai secara nyata, menurut Thomas Lickona disebut *moral knowing*, *moral feeling* dan *moral action* (Lickona, 1991: 51). Di dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki pendidikan karakter yang dalam pembelajaran PKn bukan hanya pendidikan dalam pencapaian tujuan kognitif atau pengetahuan saja melainkan memiliki juga kemampuan afektif yang akan membentuk karakter atau sikap yang belum sepenuhnya ada. Maka agar tercapainya pendidikan yang berkarakter pemerintah serta warga negara Indonesia dalam pendidikan kewarganegaraan perlu keikutsertaan untuk mewujudkannya, dari sekolah saja guru penting memulai dari mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan.

Menurut Cronbach, Lickona (1992: 37) melihat karakter dalam tiga elemen terkait; pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Pendidikan karakter sebagai pendekatan yang mungkin untuk pengajaran pendidikan moral di sekolah. Di Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengisyaratkan bahwa pendidikan kewarganegaraan harus mempertimbangkan: *personel* dan kehidupan beragama, iman dan taqwa dalam segala aspek kehidupan, literasi politik, pemahaman hukum, kehidupan manusia dan demokrasi, kecerdasan manusia dan individu, perdamaian dan kemakmuran, manusia dan jiwa nasionalisme, jati diri bangsa, patriotisme, dan bela negara dan hidup rukun. Di sinilah ada internalisasi karakter bagi manusia, terlebih generasi muda (Gultom, Widijatmoko, & Wadu, 2020).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, menurut Saryono (2010) merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif secara umum, fleksibel dan berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Jadi kualitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan teknik analisis mendalam, yaitu mengkaji masalah secara meninjau dari pustaka-pustaka lainnya dan untuk menemukan teori, mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan memperoleh pemahaman makna.

Hasil dan Pembahasan

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh seluruh mahasiswa pada jenjang pendidikan diploma maupun sarjana hingga lulus. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) berperan bagi keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara sangat strategis. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good and smart citizens*) yang memiliki komitmen yang kuat dalam mempertahankan kebinnekaan di Indonesia dan mempertahankan identitas dan integritas nasional. Menurut Budimansyah dan Suryadi (2008) bahwa PKn merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor pendidikan berbasis nilai. PKn, selain mengemban misi melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila, membina peserta didik untuk memahami hak dan kewajibannya serta mampu berposisi sebagai diri sendiri untuk menjadi warga negara yang baik.

Secara konseptual, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang memiliki banyak aspek konteks multidisiplin. Dari objek kajian ini dikembangkan konsep PKn yaitu secara harfiah diambil dari kata Latin *civicus*, yang berarti warga di era Yunani Kuno. Kata yang secara akademis diakui sebagai cikal bakal pendidikan kewarganegaraan, di Indonesia diadaptasi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan atau disingkat menjadi PKn sedangkan secara umum, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk mengembangkan potensi-potensi individu warga negara Indonesia yang memiliki wawasan, keterampilan dan sosial kewarganegaraan yang memadai, yang memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Azis Wahab (2000:18) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ialah media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, program Pendidikan Kewarganegaraan memuat konsep-konsep umum ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut.

Menurut Soemantri (2001: 166) fungsi Pendidikan Kewarganegaraan, yakni “usaha sadar yang dilakukan secara ilmiah dan psikologis untuk memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik agar terjadi internalisasi moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional, yang diwujudkan dalam integritas pribadi dan perilaku sehari-hari.” Dari keseluruhan tujuan dan fungsi Pendidikan Kewarganegaraan dan ketiga misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor *value based education*. Pendidikan kewarganegaraan ini menjelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mengemban misi pendidikan bernilai.

Pendidikan karakter adalah segala usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk karakter peserta didik (Supranoto, 2015). Pendidikan karakter ini dibahas oleh pemerintah saat memperingati HARDIKNAS pada tahun 2010 dengan tema "Pendidikan Karakter untuk Membangun Peradaban Bangsa". Pendidikan karakter menjadi suatu keharusan, karena pendidikan tidak hanya

menjadikan peserta didik menjadi cerdas, melainkan juga harus mempunyai budi pekerti dan sopan santun, sehingga keberadaannya sebagai anggota masyarakat menjadi bermakna baik bagi dirinya maupun masyarakat pada umum. (www.kemdiknas.go.id).

Dalam proses pelaksanaan pendidikan karakter dilaksanakan dalam dua cara, yakni intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Proses pelaksanaan pendidikan karakter mengandung tiga komponen, yakni moral *knowing*, moral *feeling*, dan moral *action* (Lickona, 1991: 32). Pendidikan karakter bertujuan agar mahasiswa mempunyai kompetensi yang tinggi, mempunyai integritas dan perilaku moral yang baik. Tujuan pendidikan karakter tertuang juga dalam Kemendiknas (2011 yaitu mengembangkan nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila yaitu: (1) mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki hati yang baik, fikiran yang membangun kehidupan yang kebangsaan multikultural; (2) membangun dan membentuk bangsa yang cerdas, berilmu, berkontribusi terhadap perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan mengembangkan potensi warga negara agar menjadi warga negara yang baik dan berbudaya luhur, dan (3) membangun dan mewujudkan warga negara yang memiliki sikap cinta damai, mandiri, kreatif dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lainnya.

Selaras dengan tujuan dan fungsi pendidikan karakter, di Indonesia perilaku-perilaku penyimpangan yang dilakukan siswa seperti tawuran, perselisihan, dan tindakan anarkhis bahkan saat sudah menjadi mahasiswa masih saja ada yang melakukannya. Tidak ada yang bisa berubah dari perilaku-perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pendidikan karakter penting untuk mengubah pendidikan yang bermoral dan berakhlak sesuai dengan misi dan visi tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan karakter memiliki makna yang ingin membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang berkarakter baik untuk masyarakat, lingkungan sekitar dan negara sehingga mampu membangun peradaban generasi muda yang berkualitas. Upaya yang dilakukan untuk menanamkan pendidikan karakter dalam pendidikan kewarganegaraan ialah dilakukan dengan cara mencantumkan nilai-nilai karakter ke dalam silabus dan RPP. Adapula membangun pendidikan kewarganegaraan sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Selain itu, ada upaya untuk mengevaluasi model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional, jaminan hidup yang memadai bagi para guru khususnya di daerah terpencil, memperbesar akses warga miskin untuk mendapatkan pendidikan.

Pendidikan karakter bisa dilakukan dengan berbagai macam media atau cara yaitu melalui pendidikan yang ada di keluarga sebagai pendidikan pertama dan utama, dalam satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai pendidikan tingkat menengah, pendidikan tinggi dan dalam lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya pembelajaran pendidikan karakter pengenalan nilai-nilai hingga tingkah laku peserta didik sehari-hari melalui proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Perilaku guru sepanjang proses pembelajaran menjadi model pelaksanaan yang paling penting pula bagi peserta didik. Nilai-nilai diajarkan dan dibiasakan agar para peserta didik bisa mengenal dirinya dan menghindari terjadinya kekerasan (Gultom, 2010)

Kegiatan pembelajaran pendidikan karakter diawali dari tahap kegiatan pendahuluan, inti (eksplorasi, elaborasi, konfirmasi), dan penutup. Kegiatan Pendahuluan, berdasarkan standar proses, kegiatan pendahuluan dalam proses belajar mengajar terdiri dari: (1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran; (2) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; (3) menjelaskan tujuan. Pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai; dan (4) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. Kegiatan inti, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007, kegiatan inti pembelajaran terbagi atas tiga tahap yaitu eksplorasi yaitu kegiatan pembelajaran yang memberi kesempatan kepada siswa untuk memilih, menyelidiki serta

mencari berbagai informasi, pemecahan masalah dan inovasi, elaborasi yaitu kegiatan yang memungkinkan siswa bekerja dengan giat, teliti, berlatih, giat melakukan, mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri melalui berbagai kegiatan dan karya yang bermakna, dan konfirmasi yaitu guru bersama siswa mengulangi membicarakan hal-hal yang sudah diajarkan atau dijelaskan seperti berdiskusi, penilaian, serta penguatan. Kegiatan penutup, dapat dilakukan guru bersama dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya hingga melakukan berdoa bersama. Guru memberikan proses dan hasil pembelajaran dengan nilai yang ditanamkan adalah kejujuran, saling menghargai, percaya diri, santun, kritis, dan logis. Bilamana ada murid yang kekurangan nilai, guru dapat merencanakan pembelajaran dalam remedial, layanan konseling, dan dapat memberikan tugas individual atau kelompok yang sudah ditentukan.

Kelemahan pembelajaran PKn dalam perspektif pendidikan karakter seperti kegiatan berpusat pada pendidik (*teacher center*), orientasi pada hasil lebih kuat, kurang menekankan pada proses, bahan disajikan dalam bentuk informasi, posisi siswa dalam kondisi pasif siap menerima pelajaran, dan pengetahuan lebih kuat dari pada sikap dan keterampilan, penggunaan metode terbatas pada situasi pembelajaran tidak menyenangkan dan satu arah yakni indoktrinasi (Budimansyah, 2012). Jika melihat dari negara Inggris, yang menjadi isu belajar mengajar di sekolah adalah pendidikan karakter, seperti yang terungkap oleh Revell dan Arthur (2007) mengungkapkan, "pengenalan Pendidikan Kewarganegaraan dan perubahan pada Kurikulum Nasional di Inggris telah mengangkat masalah pendidikan karakter sebagai pendekatan yang mungkin untuk pengajaran pendidikan moral di sekolah." di Inggris sendiri karakter pendidikan adalah bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan.

Menurut Revell dan Arthur (2007), "Sementara pendidikan karakter dipandang sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah di Inggris." Pendidikan Kewarganegaraan tidak harus memperluas konsepnya dengan mengembangkan karakter, seperti dikutip dari Revell dan Arthur (2007: 81). Di dalam materi Karakter Budaya Bangsa Inggris yang harus dimasukkan bukan hanya materi yang diajarkan tetapi dimasukkan ke dalam kegiatan pembelajaran yang mengarah pada pembentukan karakter siswa. Contohnya: saat memulai pelajaran selalu berdoa, kegiatan ini menanamkan sifat atau karakter religius pada siswa-siswa dan guru. Pemberian tugas kepada siswa menanamkan sifat tanggung jawab terhadap tugasnya juga nilai-nilai budaya sebaiknya dimasukkan dalam indikator atau tujuan pembelajaran.

Di dalam negara Republik Rakyat Cina tidak ada istilah khusus untuk mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan khusus untuk Cina melekat dalam pendidikan moral. Pendidikan moral ini selalu terkait dengan kehidupan politik di Tiongkok. Di Lee dan Ho (2005) observasi serta Bai (1998), istilah "pendidikan moral" (*daodejiayou*) dikenal sebagai pendidikan ideologi (*sixiangjiaou*) atau pendidikan politik (*zhengzhijiaoyou*) atau ideopolitik pendidikan, sehingga kualitas moral ibarat dua sisi mata uang, yaitu kualitas ideomoral dan atau moral-ideopolitik adalah sama (*sixiangzhengzhisuzhi*) (Samsuri, 2007).

Di Indonesia, pendidikan karakter adalah proses menyaturasikan sistem nilai kemanusiaan dan nilai-nilai budaya Indonesia dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai kebersamaan adalah nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengamalan nilai secara nyata. Itulah menurut Thomas Lickona disebut *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral action* (Lickona, 1991: 51). Menurut Winarno (2011: 29) pendidikan karakter di Indonesia memandang nilai sebagai sumber dan pendidikan konten sebagai sesuatu yang ideal, penting, dan harus dikembangkan sendiri oleh siswa melalui proses intervensi dan habituasi. Dengan memiliki karakter, pendidikan nilai bisa mengantisipasi terjadinya konflik dan kekerasan (Gultom, 2016).



Dalam diagram tersebut, dapat terwujudnya Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pendidikan Karakter yang saling berkaitan berarti: pertama, Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai kontribusi pendidikan untuk pengembangan karakteristik yang menandai warga negara. Kedua, dalam Pendidikan Kewarganegaraan ditujukan untuk mewujudkan pembentukan karakter warga negara yang diinginkan atau diharapkan bangsa. Ketiga, Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter memiliki satu perspektif dan ruang lingkup. Keempat, Hubungan pendidikan karakter dengan pendidikan bahwa pendidikan karakter sebagai pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak, yang bertujuan mengembangkan kemampuannya. Khusus untuk Pendidikan Kewarganegaraan yang secara teoritis dirancang sebagai mata pelajaran mengandung dimensi kognitif, afektif, psikomotorik dan terintegrasi dalam hal gagasan dan moral, tentunya melahirkan dua dampak secara bersamaan, yaitu dampak instruksional dan pendampingan.

Simpulan

Untuk pemahaman bersama tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter belum ada. Dalam Pendidikan Kewarganegaraan di negara Inggris dan Republik Rakyat Cina, belum ada pemahaman bersama tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan karakter. Di satu sisi, Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter, sedangkan pendidikan karakter sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila. Karena itulah perlunya studi lebih lanjut yang difokuskan pada evaluasi tentang penyelenggaraan Pendidikan Kewarganegaraan. Di satu sisi, Pendidikan Kewarganegaraan dianggap sebagai bagian dari pendidikan karakter, sedangkan pendidikan karakter dianggap sebagai bagian dari Pendidikan Pancasila. Untuk tercapainya pendidikan karakter di dalam pendidikan kewarganegaraan perlu dalam hal keikutsertaan dari warga negara Indonesia untuk mewujudkannya, dari sekolah saja dapat dimulai dari kemampuan guru karena penting dari mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang berkarakter, berpengetahuan, wawasan, landasan pendidikan seperti pedagogi, pemahaman terhadap siswa, kemampuan dalam pemahaman kurikulum, semua itu agar dapat mengaktualisasikan potensi yang dimiliki guru kepada siswa.

Referensi

- Akbal, M. (2017). Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Pembangunan Karakter Bangsa. *Porisding Seminar Nasional [online]*, vol 2. Tersedia: <https://ojs.unm.ac.id/PSN-HSIS/article/view/4084>. [Desember 2017].
- Asmaroini, A.P., dkk. (2021). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Perkuliahan di Prodi PPKN Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada Masa Covid-19. *Jurnal Integralistik [online]*, 33(1), 34-44. Tersedia: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/26074/11291>. [Januari 2021].

- Astrid, A. (2012). Pengintegrasian Pendidikan Karakter Dalam Aktivitas Pembelajaran Bahasa Inggris. *Jurnal Pendidikan Islam [Online]*, 17(2), 271-283. Tersedia: <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/tadib/article/view/35>. [02 Desember 2012].
- Budhiman, A. (2017). Gerakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Dianti, P. (2014). Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Mengembangkan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial [Online]*, 23(1), 58-68. Tersedia: <https://ejournal.upi.edu/index.php/jpis/article/view/2062/14>. [Juni 2014].
- Dwintari J.W. (2017). Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan [Online]*, vol 7 (2), 51-57. Tersedia: <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/4271>. [November 2017].
- Fauzi, F. Y. et al. (2013). Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dalam Upaya Pembentukan Karakter Peserta Didik. *Jurnal Ppkn Unj [Online]*, vol 1 (2). Tersedia: [Http://Skripsippknunj.Org](http://Skripsippknunj.Org) Issn: 2337-5205. [2013].
- Gultom, A. F. (2010). Dialog Transformatif Agama Dan Kekerasan. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 4(2), 279-289.
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A.F., Widiyatmoko, E.K, & Wadu, L.B. 2020. Penginternalisasikan Karakter Kewarganegaraan Generasi Muda Kota Batu Melalui Kegiatan Retret, 2(2), 45-51. <https://doi.org/10.36805/jurnalbuanapengabdian.v2i2.1292>
- Helaluddin, H.W. (2018). Hakikat Pendidikan Karakter. *ResearchGate*, 6(1), 4. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/323364661_Hakikat_Pendidikan_Karakter. [2018].
- Julaiha, S. (2014). Implementasi Pendidikan Karakter Dalam Pembelajaran. *Jurnal Dinamika Ilmu [Online]*, 14 (2), 226-239. Tersedia: https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/15. [Desember 2014].
- Kurniawan, M.I. (2013). Integrasi Pendidikan Karakter Ke Dalam Pembelajaran Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD [Online]*, Jilid 1(1), 37-45. Tersedia: <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jp2sd/article/view/1528>. [April 2013].
- Listrianti, F. (2019). Urgensi Pendidikan Karakter di MIN 1 Probolinggo. *Jurnal Pedagogik [Online]*, 06(01), 1-26. Tersedia: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik/article/view/581>. [Januari-Juni 2019].
- Munawaroh, A. Keteladanan Sebagai Metode Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam [Online]*, 7 (2), 1-16. Tersedia: <https://www.riset-iaid.net/index.php/jppi/article/view/363/331>. [16 Juni 2019].
- Maunah, B. (2015). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembentuk Kepribadian Holistik Siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter [Online]*, no 1, halaman 93. Tersedia: <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/8615>. [April 2015].
- Nasution, T. (2017). Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Siswa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya [online]*, 1(2), 1-36. Tersedia: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijtimaiyah/article/view/1393>. [Juli-Desember 2017].
- Nurdin, E. (2015). *The Policies on Civic Education in Developing National Character Indonesia*. *Jurnal International Education Studies [online]*. Tersedia: <https://eric.ed.gov/>. [Juli 30, 2015].
- Pahlevi, F. S. (2017). Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Dalam Memperkokoh Karakter Bangsa Indonesia. *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains [online]*, 2(1), 1-18. Tersedia: <https://doi.org/10.21154/ibriez.v2i1.26>. [2017].
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan Civic Disposition Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan [online]*, 7(1), 91-103. Tersedia:
-

- <https://www.neliti.com/id/publications/121771/peningkatan-civic-disposition-siswa-melaluipembelajaran-pendidikan-kewarganegar>. [Mei 2017].
- Rachmادتullah, R., & Wardani, P.A. (2016). Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Metode Pembelajaran *Contextual and Learning*. *Jurnal Pendidikan Dasar* [Online], 7(1), 118. Tersedia: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpd/article/view/612>. [30 Mei 2016].
- Sakman., & Bakhtiar. (2019). Pendidikan Kewarganegaraan dan Degradasi Moral di Era Globalisasi. *Supremasi: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya* [Online], 14(1), 01-08. Tersedia: <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/13301>. [April 2019].
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R & D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suradi. (2017). Lokakarya Yang Ditindak Lanjuti Dengan Supervisi Akademik Dengan Teknik Kunjungan Kelas Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Guru Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran Mengikuti Alur Explorasi, Elaborasi dan Konfirmasi. *Jurnal Pendidikan FKIP UNIPAS* [online], 4(3), 1-17. Tersedia: <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/DW/article/view/38>. [2017].
- Widada, W. (2016). Sintaks Model Pembelajaran Matematika Berdasarkan Perkembangan Kognitif Peserta Didik. *Jurnal Pendidikan Matematika Raflesia* [online], 1(2), 163–172. Tersedia: <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jpmr/article/view/4007>. [Desember 2016].